

LEMBAR KEGIATAN PERSERTA DIDIK (LKPD)

Tahun Pelajaran : 2021/2022
Kelas/ Semester : XI/ Genap
Mata Pelajaran : Ekonomi
Materi Pokok : APBN dan APBD

Nama peserta didik :

Kelas :

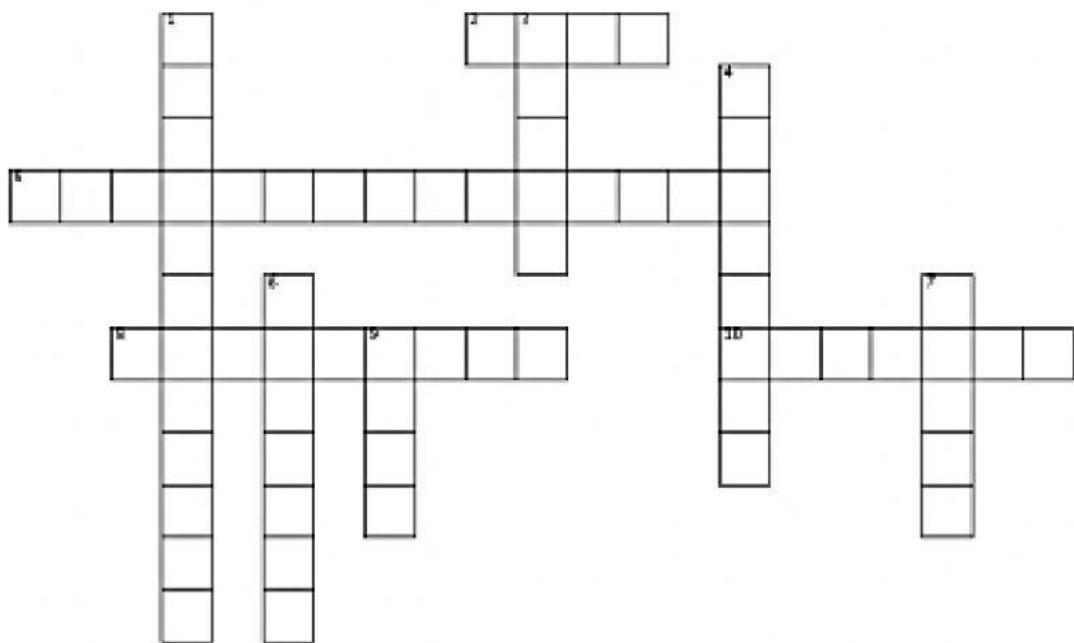
Kode LKPD :

Petunjuk:

1. Baca bahan bacaan/materi tentang APBN dan APBD dagang dengan cermat
 2. Jawablah pertanyaan pada lembar TTS dengan benar

JAWABLAH TTS BERIKUT DENGAN BENAR

TTS EKONOMI APBN



ACROSS

- 2. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui DPRD
 - 5. Salah satu penerimaan pemerintah daerah
 - 8. Masa berlakunya APBN/APBD
 - 10. Salah satu fungsi APBN

ДОКУМЕНТЫ

1. Salah satu belanja rutin negara
 2. Salah satu sumber pendapatan negara dari dalam negeri
 4. Salah satu jenis belanja pemerintah daerah
 6. Anggaran dimana jumlah penerimaan lebih besar dari pengeluaran
 7. APBN yang baru diusulkan oleh eksekutif
 9. Rencana keuangan tahunan negara yang disetujui oleh DPR

BAB
4

APBN dan APBD

APBN DAN APBD



Pengertian APBN

adalah

**rencana keuangan
tahunan pemerintahan
negara yang disetujui
oleh Dewan Perwakilan
Rakyat.**

Tujuan APBN

- 1. Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan.**
- 2. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas.**
- 3. Meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.**
- 4. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal.**
- 5. Memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja**

Fungsi APBN

Fungsi alokasi

- Anggaran negara dialokasikan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta menambah efisiensi dan efektivitas perekonomian negara

Fungsi distribusi

- Anggaran negara digunakan Negara membuat kebijakan dengan adil dan bijaksana

Fungsi otorisasi

- Anggaran negara menjadi pedoman pencapaian target penerimaan negara

Fungsi perencanaan

- Anggaran negara menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun bersangkutan

Fungsi pengawasan

- Anggaran negara menjadi pedoman untuk menilaikan kegiatan penerimaan dan pengeluaran negara sesuai dengan ketentuan dalam perencanaan

Fungsi stabilisasi

- Anggaran negara menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian

Mekanisme penyusunan APBN



Berdasarkan bagan di atas APBN disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah menyusun rencana APBN dalam bentuk nota keuangan melalui rapat dengan departemen dan lembaga teknis
- 2) Pengajuan RAPBN oleh Pemerintah kepada DPR
- 3) Pembahasan RAPBN oleh DPR dalam masa sidang
- 4) Persetujuan RAPBN oleh DPR menjadi APBN dengan undang-undang,
- 5) jika tidak disetujui pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya
- 6) APBN dilaksanakan dengan diperkuat oleh Keputusan Presiden tentang Pelaksanaan APBN.

Asas penyusunan APBN

- Kemandirian: peningkatan penerimaan dalam negeri
- Penghematan, peningkatan efisiensi dan produktivitas
- Penjaminan prioritas pembangunan

Prinsip penyusunan APBN

- a) Berdasarkan aspek pendapatan
 - Mengidentifikasi penerimaan sektor anggaran dalam jumlah dan ketepatan penyetoran
 - Mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara
 - Mengintensifkan tuntutan ganti rugi yang diderita negara
- b) Berdasarkan aspek engeluaran
 - Efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan teknis yang ada
 - Terarah dan terkendali sesuai anggaran dan program kegiatan
 - Menggunakan semaksimal mungkin produk dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan yang dimiliki

- **Pendapatan Negara dan Hibah terdiri atas:**
Penerimaan Dalam Negeri, terdiri atas:
 - 1) **Penerimaan Perpajakan**, terdiri atas:
 - a) **Pajak Dalam Negeri**, terdiri atas **Pajak Penghasilan (PPh)**, **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**, **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**, **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**, **Cukai**, dan pajak lainnya.
 - b) **Pajak Perdagangan Internasional**, terdiri atas **Bea Masuk** dan **Tarif Eksport**.
 - 2) **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**, terdiri atas:
 - a) **Penerimaan SDA (Migas dan Non Migas)**
 - b) **Bagian Laba BUMN**
 - c) **PNBP lainnya**

Belanja terdiri atas dua jenis:

- 1) **Belanja Pemerintah Pusat**, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonseptral dan tugas pemberantuan). Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi: **Belanja Pegawai**, **Belanja Barang**, **Belanja Modal**, **Pembiayaan Bunga Utang**, **subsidi BBM** dan **subsidi Non-BBM**, **Belanja Hibah**, **Belanja Sosial** (termasuk Penanggulangan Bencana), dan **Belanja Lainnya**.
- 2) **Belanja Daerah**, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi:
 - a) **Dana Bagi Hasil**, yang bersumber dari pajak dan sumber daya lainnya.
Dana bagi hasil pajak PBB, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), PPh. Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam (kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi).
 - b) **Dana Alokasi Umum**, yaitu dana berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 - c) **Dana Alokasi Khusus**, adalah dana yang berasal APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.
 - d) **Dana Otonomi Khusus**.
- 3) **Pembiayaan meliputi:**
 - a) **Pembiayaan Dalam Negeri**, meliputi **Pembiayaan Perbankan**, **Privatisasi**, **Burat Utang Negara**, serta penyertaan modal negara.
 - b) **Pembiayaan Luar Negeri**, meliputi:
 - 1) **Penarikan Pinjaman Luar Negeri**, terdiri atas **Pinjaman Program** dan **Pinjaman Proyek**.
 - 2) **Pembayaran Cicilan**, **Pokok Utang Luar Negeri**, terdiri atas **Jatuh Tempo** dan **Moratorium**.

Kebijakan-Kebijakan Anggaran

Kebijakan Fiskal Seimbang

merupakan kebijakan yang membuat penerimaan dan pengeluaran menjadi sama jumlahnya. Ada dampak positif dan negatif dari kebijakan fiskal yang satu ini. Positifnya, negara jadi tidak perlu meminjam sejumlah dana, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Negatifnya, kondisi perekonomian akan terpuruk bila ekonomi negara dalam kondisi yang tidak menguntungkan.

Kebijakan Fiskal Surplus

pada kebijakan ini jumlah pendapatan harus lebih tinggi dibandingkan pengeluaran. Kebijakan ini merupakan cara untuk menghindari inflasi.

Kebijakan Fiskal Defisit

merupakan kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus. Salah satu kelebihan kebijakan ini adalah mengatasi kelebihan dan depresi pertumbuhan perekonomian. Sedangkan kekurangannya, negara selalu dalam keadaan defisit.

Kebijakan Fiskal Dinamis

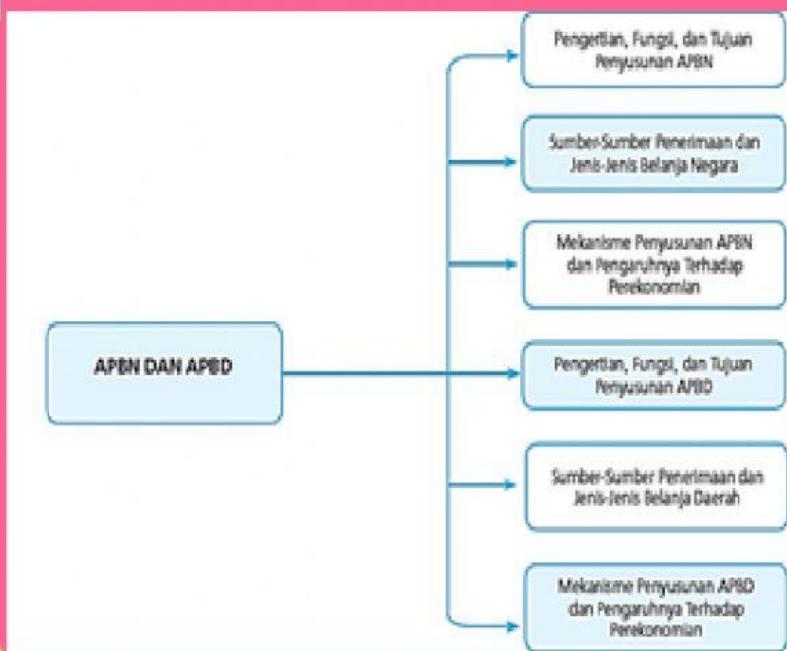
kegunaan kebijakan ini adalah menyediakan pendapatan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang bertambah seiring berjalannya waktu.

Dewi Noor Sani

Pengaruh APBN terhadap Perekonomian

1. Di sini dapat diketahui besarnya GNP yaitu Gross National Product dari tahun ke tahun sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat.
2. Jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat diatur sehingga kestabilan keuangan atau moneter negara dapat terjaga
3. Industri - industri dalam negeri dapat berkembang karena masyarakat dapat ikut berinvestasi.
4. Bisa diketahui sumber penerimaan dan penggunaan untuk belanja pegawai dan belanja barang atau jasa serta yang lainnya sehingga memperlancar distribusi pendapatan.
5. Terbukanya bagi masyarakat untuk kesempatan kerja mereka, investasi negara serta pembangunan proyek negara dapat terlaksana. Terbuka kesempatan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

BAB 4, SESI 2 APBD



Pengertian APBD

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah

Tujuan APBD

APBD disusun sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan serta belanja di antaranya:

- Membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal.
- Meningkatkan pengaturan atau juga kordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah.
- Menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa.
- Menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah

Mekanisme Penyusunan APBD



Mekanisme Penyusunan APBD

Mekanisme penyusunan APBD dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah menyusun RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
2. Pemerintah daerah akan mengajukan RAPBD tersebut kepada DPRD untuk dirapatkan apakah RAPBD tersebut disetujui atau tidak.
3. Jika DPRD memutuskan untuk menyetujui RAPBD, maka RAPBD akan disahkan menjadi APBD.
4. APBD ditetapkan dengan perda paling lambat satu bulan setelah APBN disahkan
5. Perubahan APBD ditetapkan dengan Perda paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya anggaran
6. APBD yang telah ditetapkan dengan Perda disampaikan kepada gubernur bagi pemerintah kota/kabupaten dan kepada presiden melalui Mendagri bagi pemerintah provinsi

Komponen APBD

APBD	2011	2012	2013
Pendapatan	337,164	405,041	443,285
Pendapatan Asli Daerah	87,487	71,872	87,667
- Pajak Daerah	42,156	41,651	62,162
- Pajak Bukan Daerah	45,331	30,221	25,505
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	3,420	3,837	4,845
- Lain-lain PADA yang Sah	11,273	12,496	13,384
Dana Perimbangan	275,284	325,181	307,944
- Dana Bagi Hasil Pajak bagi Hasil Bukan Pajak	89,765	77,877	73,934
- Dana Alokasi Umum	187,186	182,216	201,281
- Dana Alokasi Khusus	18,323	21,378	21,720
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	24,411	28,898	27,487
- Hibah	3,109	4,248	3,408
- Dana Diversifikasi	533	377	261
- Dana Bagi Hasil Pajak dan Propinsi dan Pemerintah Daerah	11,003	11,881	13,113
- Dana Pengelolaan dan Operasional Kehu	20,452	15,427	20,841
- Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah	3,243	4,955	5,185
- Lain-lain	6,814	7,871	7,035
Belanja	333,599	445,565	474,185
Belanja Pada Lengkap	212,446	243,571	231,438
- Belanja Pegawai	181,004	174,562	201,461
- Belanja Bantuan	316	189	179
- Belanja Kesehatan	602	631	708
- Belanja Pendidikan	12,352	16,273	14,497
- Belanja Kesejahteraan Sosial	26,168	31,517	30,261
- Belanja Bagi Hasil Kpd Propinsi/Kota dan Daerah	4,487	12,178	14,834
- Belanja Bantuan Keuangan Kpd Propinsi/Kota dan Daerah	5,213	26,797	26,719
- Belanja Tdk Terstruktur	837	1,733	2,213
Belanja Lengkap	140,451	201,092	222,489
- Belanja Pegawai	127,500	133,816	151,585
- Belanja Bantuan dan Jasa	12,953	17,276	14,903
- Belanja Sosial	1,094	9,970	10,027
Pembayaran	65,186	40,487	38,370
Bantuan	74,401	48,091	41,101

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah didapatkan dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
 - Pajak Daerah (PBB, Pajak Cukai, Pajak Penghasilan, dll)
 - Retrebusi Daerah seperti perizinan mendirikan usaha, tempat rekreasi, parkir
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - Pendapatan Asli Daerah Lain-Lain
- b. Dana Perimbangan
 - Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional seperti pendidikan, kesehatan dan lain lainnya
- c. Pendapatan Daerah Lain-Lain yang Sah
 - Pendapatan Hibah

Belanja Daerah

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung, yaitu belanja yang tidak memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan. Belanja tidak langsung biasa terdiri atas:

- Belanja Pegawai yang meliputi gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD dan biaya pemungutan pajak daerah.
- Belanja Bunga
- Belanja Subsidi
- Belanja Hibah
- Belanja Bantuan Sosial
- Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik

b. Belanja Langsung

Belanja langsung, yaitu belanja yang memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan daerah. Belanja langsung ini terdiri dari beberapa komponen lain yang lebih kecil lainnya seperti belanja pegawai termasuk honorarium PNS, honorarium non-PNS, uang lembur, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS. Selain itu, belanja langsung juga termasuk belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Pengaruh APBD Terhadap Pembangunan Ekonomi Sebagai Berikut :

- a. mengenai dampak dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempengaruhi perekonomian yang dimiliki, kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah
- b. mampu mereduksi tingkat kemiskinan yang ada di suatu daerah secara signifikan.
- c. mempengaruhi terhadap pengurangan atau penanggulangan masalah pengangguran yang dimiliki di daerah masing-masing.
- d. mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonominya secara signifikan melalui alokasi APBD